GROUP 1

“KORUPSI BESAR/ELIT”

Korupsi terus menggerogoti ekonomi, kualitas layanan, dan kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di negara ini. Sebuah laporan baru-baru ini mencatat bahwa 'tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia, dimana begitu banyak politisi dipenjara karena korupsi, yang sebagian besar dilakukan bersama dengan para pejabat dan pengusaha'. Termasuk kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengambil miliaran rupiah uang suap dan Menteri Olahraga yang terlibat dalam skandal korupsi multi-miliar rupiah.

GROUP 2

“KORUPSI BAWAHAN/BIROKRASI”

Korupsi terus menggerogoti ekonomi, kualitas layanan, dan kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di negara ini. Korupsi di tingkat lokal dinilai telah meluas di semua lembaga dan layanan publik. Menurut survei terbaru, tahun lalu, 43% orang Indonesia harus membayar suap kepada pejabat pemerintah dan 70% percaya bahwa korupsi pejabat pemerintah ini telah meningkat dalam dua tahun terakhir.

GROUP 3

“KEBERHASILAN PEMERINTAH”

Pemerintah telah menerima pujian dari masyarakat internasional atas keberhasilan baru-baru ini dalam memerangi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya, memiliki catatan mengesankan dalam memberantas korupsi. Sejak dibentuk, KPK telah menangkap hampir 400 orang atas tuduhan korupsi, dan telah mencapai tingkat keyakinan 100%. Dalam 6 bulan pertama tahun 2014, KPK berhasil mengembalikan Rp. 2,8 triliun uang negara yang dicuri.

GROUP 4

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIPIL/ INDIVIDU”

Sekarang, jauh berbeda dari sebelumnya, warga negara biasa bisa dengan mudahnya terlibat dalam upaya memerangi korupsi. Apabila ada saksi atas suatu tindakan korupsi, warga negara biasa dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan sms tentang korupsi ke hotline 1575 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pelapor tersebut dijamin tetap dirahasiakan termasuk informasi yang telah diberikan.
Semua orang memiliki hak untuk mengakses informasi pemerintah, dan tahun lalu pemerintah telah meluncurkan sebuah portal data online yang mudah diakses oleh masyarakat dalam hal anggaran dan dokumen pemerintah. Demikian juga, beberapa organisasi anti-korupsi telah berdiri dan ada di seluruh negeri; semua warga negara bisa lebih terlibat dengan menjadi anggota organisasi tersebut atau menghadiri kegiatan mereka, seperti kegiatan selama sepekan dalam rangka memperingati anti-korupsi tahunan atau demonstrasi yang dilaksanakan pada Hari Antikorupsi Internasional